

3. Penandaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Provinsi

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X	XX	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X	XX	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
X	XX	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
X	XX	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
X	XX	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X	XX	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
X	XX	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X	XX	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
X	XX	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
X	XX	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
X	XX	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
X	XX	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
X	XX	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
X	XX	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
X	XX	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
X	XX	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
X	XX	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
X	XX	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
X	XX	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
X	XX	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
X	XX	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
X	XX	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
X	XX	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
X	XX	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
X	XX	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material
X	XX	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
X	XX	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
X	XX	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X	XX	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar
X	XX	01	1.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
X	XX	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel
X	XX	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
X	XX	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
X	XX	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud
X	XX	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
X	XX	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
X	XX	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
X	XX	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
X	XX	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
X	XX	01	1.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
X	XX	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel
X	XX	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
X	XX	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
X	XX	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
X	XX	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
X	XX	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	01	1.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
X	XX	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1	01	02	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
1	01	02	1.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	1.01	0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.01	0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.01	0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.01	0013	Pembangunan Asrama Sekolah
1	01	02	1.01	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.01	0015	Pembangunan Fasilitas Parkir
1	01	02	1.01	0016	Pembangunan Kantin Sekolah

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	1.01	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	1.01	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	1.01	0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.01	0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.01	0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.01	0036	Pengadaan Mebel Sekolah
1	01	02	1.01	0037	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1	01	02	1.01	0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1	01	02	1.01	0040	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
1	01	02	1.01	0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1	01	02	1.01	0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.01	0055	Pemeliharaan Mebel
1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
1	01	02	1.01	0058	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan
1	01	02	1.01	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
1	01	02	1.01	0064	Penyediaan Infrastruktur TIK
1	01	02	1.01	0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
1	01	02	1.01	0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1	01	02	1.01	0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.01	0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah
1	01	02	1.01	0070	Pembangunan Ruang Laboratorium
1	01	02	1.01	0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1	01	02	1.01	0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1	01	02	1.01	0074	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah
1	01	02	1.01	0076	Penataan Ruang/Sudut Baca
1	01	02	1.01	0077	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
1	01	02	1.02	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
1	01	02	1.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	1.02	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa
1	01	02	1.02	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium
1	01	02	1.02	0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	1.02	0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.02	0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.02	0009	Pembangunan Asrama Sekolah
1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.02	0011	Pembangunan Fasilitas Parkir
1	01	02	1.02	0012	Pembangunan Kantin Sekolah
1	01	02	1.02	0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	1.02	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
1	01	02	1.02	0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah
1	01	02	1.02	0029	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1	01	02	1.02	0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1	01	02	1.02	0032	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
1	01	02	1.02	0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1	01	02	1.02	0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.02	0048	Pemeliharaan Mebel
1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
1	01	02	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
1	01	02	1.02	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
1	01	02	1.02	0058	Penyediaan infrastruktur TIK
1	01	02	1.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
1	01	02	1.02	0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.02	0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik
1	01	02	1.02	0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1	01	02	1.02	0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1	01	02	1.02	0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.02	0067	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah
1	01	02	1.02	0068	Penataan Ruang/Sudut Baca
1	01	02	1.02	0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	1.02	0070	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir
1	01	02	1.02	0071	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah
1	01	02	1.02	0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik
1	01	02	1.02	0074	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1	01	02	1.02	0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	1.03	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
1	01	02	1.03	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	1.03	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.03	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.03	0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.03	0007	Pembangunan Asrama Sekolah
1	01	02	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.03	0009	Pembangunan Fasilitas Parkir
1	01	02	1.03	0010	Pembangunan Kantin Sekolah
1	01	02	1.03	0012	Pembangunan Ruang Laboratorium
1	01	02	1.03	0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas
1	01	02	1.03	0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
1	01	02	1.03	0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
1	01	02	1.03	0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
1	01	02	1.03	0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
1	01	02	1.03	0028	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
1	01	02	1.03	0029	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
1	01	02	1.03	0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
1	01	02	1.03	0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
1	01	02	1.03	0032	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
1	01	02	1.03	0033	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
1	01	02	1.03	0034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
1	01	02	1.03	0035	Pengadaan Mebel Sekolah
1	01	02	1.03	0036	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1	01	02	1.03	0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1	01	02	1.03	0039	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
1	01	02	1.03	0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1	01	02	1.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	0054	Pemeliharaan Mebel
1	01	02	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
1	01	02	1.03	0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
1	01	02	1.03	0063	Penyediaan infrastruktur TIK
1	01	02	1.03	0064	Penataan Ruang/Sudut Baca
1	01	02	1.03	0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.03	0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1	01	02	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
1	01	02	1.03	0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
1	01	02	1.03	0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1	01	02	1.03	0075	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
1	01	02	1.03	0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah
1	01	02	1.03	0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.03	0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.03	0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	1.03	0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	3.03	0062	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus
1	01	02	3.04	0001	Pembangunan Gedung Akademi Komunitas
1	01	02	3.04	0002	Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas
1	01	02	3.04	0003	Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas
1	01	02	3.04	0004	Pembangunan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
1	01	02	3.04	0005	Pembangunan Perpustakaan Akademi Komunitas
1	01	02	3.04	0006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
1	01	02	3.04	0007	Pemeliharaan Gedung Akademi Komunitas
1	01	02	3.04	0008	Pemeliharaan Ruang Belajar Akademi Komunitas
1	01	02	3.04	0009	Pemeliharaan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
1	01	02	3.04	0010	Pemeliharaan Perpustakaan Akademi Komunitas
1	01	02	3.04	0011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
1	01	02	3.04	0012	Rehabilitasi Gedung Akademi Komunitas
1	01	02	3.04	0013	Rehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas
1	01	02	3.04	0014	Rehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas
1	01	02	3.04	0015	Rehabilitasi Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
1	01	02	3.04	0016	Rehabilitasi Perpustakaan Akademi Komunitas
1	01	02	3.04	0017	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
1	01	02	3.04	0018	Penyediaan Sarana Akademi Komunitas

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	3.04	0019	Rehabilitasi Sarana Akademi Komunitas
1	01	02	3.04	0020	Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas
1	01	02	3.04	0028	Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas
1	01	02	3.04	0029	Penyediaan bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas
1	01	02	3.04	0032	Penerbitan Izin Akademi Komunitas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	02	3.04	0042	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
1	01	02	3.04	0043	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas
1	01	02	3.07	0001	Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan
1	01	02	4.03	0062	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus
1	01	02	4.04	0001	Pembangunan Gedung Akademi Komunitas
1	01	02	4.04	0002	Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas
1	01	02	4.04	0003	Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas
1	01	02	4.04	0004	Pembangunan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
1	01	02	4.04	0005	Pembangunan Perpustakaan Akademi Komunitas
1	01	02	4.04	0006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
1	01	02	4.04	0007	Pemeliharaan Gedung Akademi Komunitas
1	01	02	4.04	0008	Pemeliharaan Ruang Belajar Akademi Komunitas
1	01	02	4.04	0009	Pemeliharaan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
1	01	02	4.04	0010	Pemeliharaan Perpustakaan Akademi Komunitas
1	01	02	4.04	0011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
1	01	02	4.04	0012	Rehabilitasi Gedung Akademi Komunitas
1	01	02	4.04	0013	Rehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas
1	01	02	4.04	0014	Rehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas
1	01	02	4.04	0015	Rehabilitasi Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
1	01	02	4.04	0016	Rehabilitasi Perpustakaan Akademi Komunitas
1	01	02	4.04	0017	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
1	01	02	4.04	0018	Penyediaan Sarana Akademi Komunitas
1	01	02	4.04	0019	Rehabilitasi Sarana Akademi Komunitas
1	01	02	4.04	0020	Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas
1	01	02	4.04	0028	Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas
1	01	02	4.04	0029	Penyediaan bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	4.04	0032	Penerbitan Izin Akademi Komunitas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	02	4.04	0042	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
1	01	02	4.04	0043	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas
1	01	02	4.07	0001	Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan
1	01	03	1.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1	01	03	1.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah
1	01	03	1.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1	01	03	1.02	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus
1	01	06	1.01	0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi
1	01	07	7.01	0001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah
1	01	07	7.01	0002	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah
1	01	07	7.01	0005	Pembinaan Manajemen Dayah
1	01	07	7.01	0008	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah
1	01	07	7.01	0009	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah
1	01	07	7.01	0015	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
1	01	08	7.01	0002	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh
1	01	08	7.01	0003	Fasilitasi Pendirian Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh
1	01	08	7.02	0001	Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh
1	01	08	7.02	0003	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Non Formal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh
1	01	08	7.02	0004	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
1	02	02	1.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.01	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02	02	1.01	0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis <i>Telemedicine</i> , dll)
1	02	02	1.01	0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ <i>Regional Maintenance Center</i>
1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	0020	Penyediaan <i>Telemedicine</i> di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	1.01	0024	Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ <i>Regional Maintenance Center</i>
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
1	02	02	1.02	0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
1	02	02	3.01	0041	Mendukung Pembangunan Puskesmas
1	02	02	3.01	0042	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialisik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02	02	3.02	0031	Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)
1	02	02	3.02	0032	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
1	02	02	3.02	0033	Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi
1	02	02	3.02	0034	Dukungan pelayanan kesehatan lainnya
1	02	02	3.02	0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS
1	02	02	3.02	0036	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS
1	02	02	3.02	0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB
1	02	02	3.02	0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria
1	02	02	3.02	0039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak
1	02	02	3.02	0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta
1	02	02	3.02	0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis
1	02	02	3.02	0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacangan
1	02	02	3.02	0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia
1	02	02	3.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
1	02	02	3.02	0045	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua
1	02	02	3.02	0047	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS
1	02	02	3.02	0048	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit IMS
1	02	02	3.02	0049	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit TB
1	02	02	3.02	0050	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Malaria
1	02	02	3.02	0051	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta
1	02	02	3.02	0052	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis
1	02	02	3.02	0053	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kecacangan
1	02	02	3.02	0054	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Frambusia
1	02	02	3.02	0055	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
1	02	02	3.02	0056	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
1	02	02	3.02	0057	Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota
1	02	02	4.01	0041	Mendukung Pembangunan Puskesmas
1	02	02	4.02	0031	Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)
1	02	02	4.02	0032	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02	02	4.02	0033	Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi
1	02	02	4.02	0034	Dukungan pelayanan kesehatan lainnya
1	02	02	4.02	0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS
1	02	02	4.02	0036	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS
1	02	02	4.02	0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB
1	02	02	4.02	0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria
1	02	02	4.02	0039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak
1	02	02	4.02	0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta
1	02	02	4.02	0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan
1	02	02	4.02	0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia
1	02	02	4.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
1	02	02	4.02	0045	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua
1	02	02	4.02	0047	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS
1	02	02	4.02	0048	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit IMS
1	02	02	4.02	0049	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit TB
1	02	02	4.02	0050	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Malaria
1	02	02	4.02	0051	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta
1	02	02	4.02	0052	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis
1	02	02	4.02	0053	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kecacingan
1	02	02	4.02	0054	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Frambusia
1	02	02	4.02	0055	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
1	02	02	4.02	0056	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
1	02	02	4.02	0057	Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota
1	02	03	3.02	0003	Pengembangan Rumah Sakit Untuk Wahana Pendidikan
1	02	03	3.02	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Untuk Wahana Pendidikan
1	02	03	3.02	0010	Pembentukan balai pelatihan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan
1	02	03	3.02	0011	Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
1	02	03	4.02	0003	Pengembangan Rumah Sakit Untuk Wahana Pendidikan
1	02	03	4.02	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Untuk Wahana Pendidikan
1	02	03	4.02	0010	Pembentukan balai pelatihan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02	03	4.02	0011	Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
1	02	07	3.01	0001	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	07	3.01	0002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)
1	02	07	3.01	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)
1	02	07	4.01	0001	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	07	4.01	0002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)
1	02	07	4.01	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)
1	03	02	1.01	0005	Pembangunan Bendungan
1	03	02	1.01	0009	Pembangunan Tanggul Sungai
1	03	02	1.01	0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	1.01	0015	Pembangunan Bangunan Sabo
1	03	02	1.01	0019	Pembangunan <i>Flood Forecasting And Warning System</i> (FFWS)
1	03	02	1.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1	03	02	1.01	0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	1.01	0030	Rehabilitasi Bangunan Sabo
1	03	02	1.01	0031	Rehabilitasi <i>Check Dam</i>
1	03	02	1.01	0048	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
1	03	02	1.01	0051	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
1	03	02	1.01	0055	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	1.01	0067	Operasi dan Pemeliharaan Situ
1	03	02	1.01	0068	Revitalisasi Situ
1	03	02	1.01	0069	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya
1	03	02	1.01	0070	Revitalisasi Penampung Air Alami Lainnya
1	03	02	1.01	0071	Rehabilitasi Bendungan
1	03	02	1.01	0072	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
1	03	02	1.01	0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai
1	03	02	1.01	0074	Revitalisasi Danau
1	03	02	1.01	0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.01	0076	Peningkatan <i>Breakwater</i>
1	03	02	1.01	0077	Rehabilitasi <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	1.01	0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
1	03	02	1.01	0079	Normalisasi/Restorasi Sungai

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	02	1.01	0080	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	1.01	0081	Peningkatan Kanal Banjir
1	03	02	1.01	0082	Operasi dan Pemeliharaan <i>Breakwater/Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	1.01	0083	Peningkatan Bangunan Sabo
1	03	02	1.01	0084	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
1	03	02	1.01	0085	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1	03	02	1.01	0086	Pembangunan <i>Breakwater</i>
1	03	02	1.01	0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.01	0088	Operasi dan Pemeliharaan <i>Check Dam</i>
1	03	02	1.01	0089	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.01	0091	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1	03	02	1.01	0092	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
1	03	02	1.01	0093	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
1	03	02	1.01	0094	Peningkatan Tanggul Sungai
1	03	02	1.01	0095	Rehabilitasi Unit Air Baku
1	03	02	1.01	0096	Pembangunan <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	1.01	0097	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
1	03	02	1.01	0098	Pembangunan Kanal Banjir
1	03	02	1.01	0099	Rehabilitasi Kanal Banjir
1	03	02	1.01	0100	Peningkatan <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	1.01	0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai
1	03	02	1.01	0102	Pembangunan <i>Check Dam</i>
1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.01	0104	Peningkatan <i>Flood Forecasting And Warning System (FFWS)</i>
1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
1	03	02	1.01	0106	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1	03	02	1.01	0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
1	03	02	1.01	0108	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
1	03	02	1.01	0109	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1	03	02	1.01	0110	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku
1	03	02	1.01	0111	Peningkatan Polder/Kolam Retensi
1	03	02	1.01	0112	Operasi dan Pemeliharaan Danau

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	02	1.01	0113	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo
1	03	02	1.01	0114	Peningkatan <i>Check Dam</i>
1	03	02	1.01	0115	Rehabilitasi <i>Breakwater</i>
1	03	02	1.01	0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1	03	02	1.01	0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.01	0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
1	03	02	1.01	0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
1	03	02	1.01	0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
1	03	02	1.01	0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1	03	02	1.01	0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
1	03	02	1.01	0123	Pembangunan Unit Air Baku
1	03	02	1.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	1.02	0003	Pembangunan Bendung Irigasi
1	03	02	1.02	0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	1.02	0005	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	1.02	0007	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	1.02	0009	Peningkatan Bendung Irigasi
1	03	02	1.02	0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	1.02	0011	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	1.02	0013	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	1.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi
1	03	02	1.02	0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	1.02	0017	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	1.02	0019	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	1.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
1	03	02	1.02	0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	1.02	0024	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	1.02	0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.02	0031	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1	03	02	1.02	0033	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	02	1.02	0035	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	0036	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi
1	03	02	1.02	0038	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa
1	03	02	1.02	0039	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa
1	03	02	3.01	0069	Fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota
1	03	02	4.01	0069	Fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota
1	03	03	1.01	0013	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1	03	03	1.01	0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1	03	03	1.01	0016	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1	03	03	1.01	0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1	03	03	1.01	0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
1	03	04	1.01	0009	Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota
1	03	04	1.01	0010	Peningkatan TPA/TPST/SPA
1	03	04	1.01	0011	Optimalisasi TPA/TPST/SPA
1	03	04	1.01	0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota
1	03	04	1.01	0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA
1	03	04	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
1	03	04	1.01	0015	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	04	1.01	0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
1	03	04	1.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA
1	03	05	1.01	0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota
1	03	05	1.01	0011	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
1	03	05	1.01	0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
1	03	05	1.01	0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
1	03	05	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
1	03	05	1.01	0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota
1	03	05	1.01	0017	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
1	03	05	1.01	0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
1	03	06	1.01	0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	0009	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
1	03	07	1.01	0005	Pembangunan TPS di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0006	Pembangunan TPA di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0007	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0008	Peningkatan TPS di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0009	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0010	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0011	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	07	1.01	0012	Peningkatan TPA di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0013	Pembangunan TPST di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0014	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0015	Pembangunan SPA di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0016	Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0017	Peningkatan TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0018	Peningkatan TPST di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0019	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0020	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0021	Peningkatan SPA di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0022	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0023	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0024	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0025	Optimalisasi TPA di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0027	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0028	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0029	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0032	Optimalisasi TPS di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0033	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0034	Optimalisasi TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0035	Optimalisasi TPST di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0036	Optimalisasi SPA di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	1.01	0037	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi
1	03	07	3.02	0001	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	07	3.02	0002	Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
1	03	07	3.02	0003	Penyusunan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi
1	03	07	3.02	0007	Penyusunan pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layak huni
1	03	07	4.02	0001	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar
1	03	07	4.02	0002	Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
1	03	07	4.02	0003	Penyusunan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi
1	03	07	4.02	0007	Penyusunan pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layak huni
1	03	08	1.01	0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat
1	03	08	1.01	0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
1	03	08	1.01	0014	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1	03	08	1.01	0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
1	03	08	1.01	0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1	03	08	1.01	0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek
1	03	08	1.01	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
1	03	08	1.01	0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	08	1.01	0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1	03	08	6.01	0009	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat
1	03	09	1.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
1	03	09	1.01	0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	03	09	1.01	0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
1	03	09	1.01	0011	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
1	03	09	1.01	0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
1	03	10	1.01	0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
1	03	10	1.01	0025	Rehabilitasi Jembatan
1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan
1	03	10	1.01	0027	Pemeliharaan Berkala Jembatan
1	03	10	1.01	0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
1	03	10	1.01	0029	Pelebaran Jembatan
1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan
1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan
1	03	10	1.01	0032	Pembangunan Jembatan
1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan
1	03	10	1.01	0034	Pembangunan Terowongan/Tunnel
1	03	10	1.01	0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
1	03	10	1.01	0036	Penggantian Jembatan
1	03	10	1.01	0037	Pembangunan Underpass
1	03	10	1.01	0038	Pemeliharaan Berkala Jalan
1	03	10	1.01	0039	Pembangunan Flyover
1	03	10	1.01	0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar
1	03	10	1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
1	03	10	1.01	0042	Pembangunan Jalan
1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
1	03	10	1.01	0044	Pengelolaan Leger Jalan
1	03	11	1.01	0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	11	1.01	0010	Penyediaan <i>Training Need Assessment</i> (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
1	03	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
1	03	11	1.01	0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
1	03	11	1.01	0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
1	03	11	1.01	0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
1	03	11	1.02	0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi
1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI
1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
1	03	11	1.03	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
1	03	11	1.03	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
1	03	11	1.03	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
1	03	11	1.03	0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi
1	03	11	3.01	0009	Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik konstruksi bagi OAP
1	03	11	4.01	0009	Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik konstruksi bagi OAP
1	03	12	1.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
1	03	12	1.01	0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
1	03	12	1.01	0006	Penetapan RTRW Provinsi
1	03	12	1.01	0007	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi
1	03	12	1.01	0008	Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi
1	03	12	1.01	0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang
1	03	12	1.02	0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
1	03	12	1.02	0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	12	1.02	0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota
1	03	12	1.02	0007	Penyusunan RTRW Provinsi
1	03	12	1.02	0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota
1	03	12	1.02	0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota
1	03	12	1.02	0010	Penyusunan Peta Dasar
1	03	12	1.02	0011	Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota
1	03	12	1.02	0012	Koordinasi Fasilitas Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota
1	03	12	1.02	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi
1	03	12	1.03	0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
1	03	12	1.03	0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
1	03	12	1.03	0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha
1	03	12	1.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
1	03	12	1.03	0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
1	03	12	1.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
1	03	12	1.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1	03	12	1.04	0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang
1	03	12	1.04	0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
1	03	12	1.04	0008	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
1	03	12	1.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang
1	03	12	1.04	0010	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
1	03	12	1.04	0011	Penilaian Perwujudan RTR
1	03	12	1.04	0012	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang
1	03	12	1.04	0013	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
1	03	12	1.04	0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMKÂ
1	03	12	3.02	0005	Koordinasi Fasilitas Penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota
1	03	12	3.02	0006	Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota
1	03	12	3.02	0007	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota
1	03	12	3.02	0008	Pelaksanaan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	12	3.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
1	03	12	3.03	0005	Pelaksanaan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha
1	03	12	3.04	0005	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
1	03	12	3.04	0006	Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang
1	03	12	3.04	0007	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang
1	03	12	3.04	0008	Pelaksanaan Audit Tata Ruang
1	03	12	3.04	0009	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
1	03	12	3.05	0001	Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi
1	03	12	3.06	0001	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
1	03	12	3.06	0002	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
1	03	12	3.06	0004	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
1	03	12	4.02	0005	Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota
1	03	12	4.02	0006	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota
1	03	12	4.02	0007	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota
1	03	12	4.02	0008	Pelaksanaan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota
1	03	12	4.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
1	03	12	4.03	0005	Pelaksanaan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha
1	03	12	4.04	0005	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
1	03	12	4.04	0006	Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang
1	03	12	4.04	0007	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang
1	03	12	4.04	0008	Pelaksanaan Audit Tata Ruang
1	03	12	4.04	0009	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
1	03	12	4.05	0001	Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi
1	03	12	4.06	0001	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
1	03	12	4.06	0002	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
1	03	12	4.06	0004	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
1	03	12	6.03	0003	Pengelolaan Kawasan Khusus

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	13	5.01	0003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
1	03	13	5.01	0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang
1	03	13	5.01	0006	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang
1	03	13	5.01	0007	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten
1	03	13	5.01	0008	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
1	03	13	5.02	0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis
1	03	13	5.02	0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan
1	03	13	5.02	0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu
1	03	13	5.02	0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh
1	03	13	5.02	0005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri
1	03	13	5.02	0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo
1	03	13	5.02	0007	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru
1	03	13	5.02	0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi
1	03	13	5.02	0009	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede
1	03	13	5.02	0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis
1	03	13	5.02	0011	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates
1	03	13	5.02	0012	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret
1	03	13	5.02	0013	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo
1	03	13	5.02	0014	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton
1	03	13	5.02	0015	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman
1	03	13	5.02	0016	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman
1	03	13	5.02	0017	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo
1	03	13	5.02	0018	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul
1	03	13	5.02	0019	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro
1	03	13	5.03	0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang
1	03	13	5.04	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	04	02	1.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
1	04	02	1.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
1	04	02	1.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
1	04	02	1.01	0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.01	0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.01	0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi
1	04	02	1.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
1	04	02	1.01	0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi
1	04	02	1.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
1	04	02	1.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
1	04	02	1.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan
1	04	02	1.02	0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	1.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
1	04	02	1.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	1.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	1.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
1	04	02	1.03	0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.03	0009	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi
1	04	02	1.03	0010	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	04	02	1.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi
1	04	02	1.04	0003	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan
1	04	02	1.04	0005	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.04	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
1	04	02	1.04	0007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
1	04	03	1.01	0008	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP
1	04	03	1.01	0011	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	1.01	0012	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.01	0013	Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.01	0014	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
1	04	03	1.01	0015	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh
1	04	03	1.01	0016	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh
1	04	03	1.01	0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
1	04	03	1.01	0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
1	04	03	1.01	0019	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	04	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.02	0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.02	0008	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali
1	04	03	1.02	0009	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.02	0010	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.02	0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.02	0012	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.02	0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.02	0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
1	04	05	1.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1	04	05	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	04	05	1.01	0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
1	04	05	1.01	0005	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman
1	04	05	1.01	0006	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1	04	05	1.01	0007	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman
1	04	06	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
1	05	02	1.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
1	05	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
1	05	02	1.02	0004	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
1	05	03	1.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)
1	05	03	1.02	0022	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
1	05	03	1.02	0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1	05	03	1.02	0026	Pengelolaan Risiko Bencana
1	05	03	1.02	0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1	05	03	1.02	0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1	05	03	1.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1	05	03	1.03	0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
1	05	03	1.03	0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi
1	05	03	1.04	0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
1	05	03	1.04	0011	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
1	05	03	1.04	0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.04	0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
1	05	03	1.04	0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
1	05	03	1.04	0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
1	05	04	1.01	0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	05	04	1.01	0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
1	05	04	1.01	0006	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
1	05	04	1.01	0007	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
1	05	04	1.01	0012	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan
1	05	04	1.01	0013	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
1	05	04	1.01	0016	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran
1	05	04	1.01	0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
1	05	04	1.01	0020	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota
1	05	04	1.01	0021	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
1	05	04	1.01	0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
1	05	04	1.01	0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
1	05	04	1.01	0025	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi
1	05	04	1.01	0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
1	05	04	1.01	0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
1	05	04	1.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran
1	05	04	1.02	0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1	06	04	1.04	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
1	06	04	1.05	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	06	06	1.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1	06	07	1.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1	06	07	1.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
2	07	03	1.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
2	07	03	1.01	0004	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
2	07	04	1.02	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
2	07	04	1.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
2	07	04	1.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
2	08	02	1.03	0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2	08	03	1.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
2	08	04	1.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
2	08	04	1.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
2	08	04	1.02	0003	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
2	08	05	1.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
2	08	05	1.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
2	08	06	1.02	0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
2	08	06	1.02	0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
2	08	07	1.03	0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.03	0005	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.03	0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.03	0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	09	02	1.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
2	09	02	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
2	09	02	1.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
2	09	03	1.01	0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi
2	09	03	1.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi
2	09	03	1.02	0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
2	09	03	1.02	0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
2	09	03	1.02	0007	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
2	09	03	1.02	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
2	09	04	1.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi
2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
2	09	05	1.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
2	09	05	1.01	0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
2	09	05	1.01	0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
2	10	03	1.01	0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
2	10	03	1.01	0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
2	10	03	1.01	0004	Pengumuman Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum
2	10	03	1.01	0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
2	10	03	1.01	0006	Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
2	10	03	3.01	0002	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi
2	10	03	3.04	0001	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi
2	10	03	4.01	0002	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi
2	10	03	4.04	0001	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi
2	10	03	7.02	0001	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah
2	10	03	7.03	0001	Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	10	04	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	10	04	1.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	10	04	1.01	0006	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	10	05	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2	10	05	1.01	0002	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2	10	05	1.01	0003	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2	10	05	1.01	0004	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2	10	05	1.01	0005	Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Provinsi
2	10	06	1.01	0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	10	06	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	10	06	1.01	0005	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
2	10	06	1.02	0001	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	10	06	1.02	0002	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	10	06	1.02	0003	Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi
2	10	06	1.02	0004	Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi
2	10	07	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	10	07	1.01	0002	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	10	07	3.02	0001	Inventarisasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi
2	10	07	3.02	0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi
2	10	07	3.03	0001	Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat
2	10	07	3.04	0002	Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik
2	10	07	3.06	0001	Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir
2	10	07	3.07	0002	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi
2	10	07	3.08	0001	Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum
2	10	07	3.09	0001	Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota
2	10	07	3.09	0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota
2	10	07	3.10	0001	Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi
2	10	07	3.11	0001	Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di Provinsi Papua
2	10	07	3.11	0002	Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat
2	10	07	4.02	0001	Inventarisasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi
2	10	07	4.02	0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi
2	10	07	4.03	0001	Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat
2	10	07	4.04	0002	Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik
2	10	07	4.06	0003	Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir
2	10	07	4.07	0002	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi
2	10	07	4.08	0001	Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	10	07	4.09	0001	Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota
2	10	07	4.09	0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota
2	10	07	4.10	0001	Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi
2	10	07	4.11	0001	Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di Provinsi Papua Barat
2	10	07	4.11	0002	Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat
2	10	08	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	10	08	1.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
2	10	08	1.02	0002	Pemanfaatan Tanah Kosong
2	10	08	1.02	0003	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong
2	10	10	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
2	10	10	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi
2	10	10	1.01	0003	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi
2	10	10	1.01	0004	Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul
2	10	10	1.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Provinsi
2	10	10	3.01	0005	Perencanaan penggunaan tanah [Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota
2	10	10	4.01	0005	Perencanaan penggunaan tanah [Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota
2	10	10	7.01	0004	Fasilitasi Penetapan Zona Nilai Tanah Kabupaten/Kota
2	10	10	7.02	0001	Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi
2	10	11	5.01	0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
2	10	11	5.01	0002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan
2	10	11	5.01	0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa
2	10	11	5.01	0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
2	10	11	5.01	0007	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan
2	10	11	5.02	0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
2	10	11	5.03	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	10	12	7.01	0001	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah
2	10	12	7.02	0001	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin
2	10	13	7.01	0001	Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda
2	10	13	7.01	0002	Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB
2	10	13	7.01	0003	Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat
2	10	15	7.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir
2	10	15	7.01	0002	Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai
2	10	15	7.01	0003	Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah Wilayah Perbatasan
2	10	15	7.01	0004	Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah pada Pulau Terpencil
2	10	15	7.01	0005	Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil (terdalam), Wilayah Tertentu dan Perbatasan
2	10	16	7.01	0001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
2	10	16	7.01	0002	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
2	10	16	7.01	0003	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
2	10	17	7.01	0001	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi
2	10	17	7.01	0003	Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	11	02	1.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
2	11	02	1.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2	11	03	1.01	0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
2	11	03	1.01	0014	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
2	11	03	1.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
2	11	03	1.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
2	11	03	1.02	0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	11	03	1.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	11	04	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	11	04	1.01	0003	Pengelolaan Kebun Raya
2	11	04	1.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2	11	04	1.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
2	11	04	1.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
2	11	04	1.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
2	11	05	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	11	05	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
2	11	06	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
2	11	11	1.01	0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
2	11	11	1.01	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
2	11	11	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2	11	11	1.01	0006	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2	11	11	1.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2	11	11	1.01	0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
2	11	11	1.01	0013	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi
2	11	11	1.01	0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
2	12	04	1.02	0007	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	12	04	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	12	04	3.02	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
2	12	04	4.02	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
2	13	02	1.01	0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
2	13	03	1.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
2	13	04	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	13	04	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
2	13	04	1.01	0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
2	13	04	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
2	13	05	1.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2	13	06	3.02	0002	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna
2	13	07	4.01	0001	Pembangunan Sanggar PKK di Kampung
2	13	07	4.01	0002	Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di kampung
2	13	07	4.04	0004	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
2	13	07	4.04	0006	Penyedia Solar Sel bagi Masyarakat Kampung
2	13	07	4.04	0007	Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung
2	13	07	4.04	0008	Pembangunan dan Bantuan Perlengkapan Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung
2	13	07	4.05	0002	Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Kampung Berbasis Teknologi
2	13	07	4.06	0001	Bantuan Mesin Babat/Pemotong Rumput bagi Masyarakat di Kampung
2	13	07	4.06	0004	Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tala
2	13	07	4.08	0002	Pengolahan, Penginputan dan Publikasi DataDPMK
2	13	08	3.01	0001	Pembangunan Rumah Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat
2	13	08	3.01	0002	Penyediaan Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua
2	13	08	3.01	0003	Pembangunan Pasar Mama-mama Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua
2	13	08	3.01	0004	Pembangunan Rumah Layak Huni Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua
2	13	08	3.01	0005	Pembangunan Jaringan Internet di 5 (Lima) Wilayah Adat
2	13	08	3.01	0006	Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat
2	13	08	3.02	0004	Identifikasi Potensi dan Masalah Pembangunan Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	14	02	1.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
2	14	02	1.01	0014	Fasilitasi pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
2	14	02	1.01	0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain
2	14	04	1.01	0015	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
2	14	04	1.02	0001	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
2	14	04	4.01	0018	Koordinasi pembinaan Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
2	15	02	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
2	15	02	1.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
2	15	02	1.01	0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
2	15	02	1.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi
2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
2	15	02	1.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
2	15	02	1.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2	15	02	1.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
2	15	02	1.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B
2	15	02	1.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
2	15	02	1.03	0008	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B
2	15	02	1.03	0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B
2	15	02	1.03	0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
2	15	02	1.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
2	15	02	1.05	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
2	15	02	1.05	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
2	15	02	1.05	0006	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
2	15	02	1.05	0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	02	1.07	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
2	15	02	1.07	0007	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
2	15	02	1.07	0008	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)
2	15	02	1.07	0009	Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
2	15	02	1.07	0011	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
2	15	02	1.07	0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan
2	15	02	1.07	0013	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
2	15	02	1.07	0014	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe B
2	15	02	1.08	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
2	15	02	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.09	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.09	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.10	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.10	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.10	0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.10	0005	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.11	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.11	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.12	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.12	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.12	0003	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	02	1.12	0004	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.14	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi
2	15	02	1.14	0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	02	1.15	0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.15	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.15	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	02	3.05	0006	Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
2	15	02	3.17	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ
2	15	02	4.05	0006	Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
2	15	02	4.17	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ
2	15	02	6.04	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A
2	15	02	6.04	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung)
2	15	02	6.04	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe A

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	02	6.04	0007	Penyelenggaraan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe A
2	15	02	6.04	0008	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
2	15	02	6.04	0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe A
2	15	03	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
2	15	03	1.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi
2	15	03	1.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi
2	15	03	1.04	0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
2	15	03	1.05	0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	03	1.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.06	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
2	15	03	1.07	0001	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
2	15	03	1.07	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
2	15	03	1.07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
2	15	03	1.08	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.08	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.08	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.09	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.09	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.09	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.09	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.09	0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	03	1.10	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	03	1.10	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	03	1.10	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	03	1.10	0006	Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau
2	15	03	1.10	0007	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
2	15	03	1.10	0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	03	1.10	0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	03	1.11	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.11	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.12	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.12	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	03	1.14	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.15	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.15	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.16	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.16	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	3.08	0004	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional
2	15	03	3.17	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran
2	15	03	4.08	0004	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional
2	15	03	4.17	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran
2	15	04	3.01	0005	Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara
2	15	04	3.01	0006	Pengelolaan Bandara
2	15	04	3.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara
2	15	04	3.02	0002	Pembangunan Bandar Udara
2	15	04	3.02	0003	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara
2	15	04	3.02	0004	Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara
2	15	04	3.03	0001	Rekomendasi penetapan lokasi bandar udara

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	04	3.03	0002	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara
2	15	04	3.04	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang Penerbangan
2	15	04	3.08	0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi
2	15	04	3.08	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi
2	15	04	3.10	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian
2	15	04	4.01	0005	Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara
2	15	04	4.01	0006	Pengelolaan Bandara
2	15	04	4.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara
2	15	04	4.02	0002	Pembangunan Bandar Udara
2	15	04	4.02	0003	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara
2	15	04	4.02	0004	Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara
2	15	04	4.03	0001	Rekomendasi penetapan lokasi bandar udara
2	15	04	4.03	0002	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara
2	15	04	4.04	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang Penerbangan
2	15	05	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
2	15	05	1.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian
2	15	05	1.01	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
2	15	05	1.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	05	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah
2	15	05	1.03	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	05	1.03	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi
2	15	05	1.04	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
2	15	05	1.05	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	05	1.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi
2	15	05	1.06	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
2	15	05	1.06	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
2	15	05	1.07	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	05	1.07	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan Kewenangan Provinsi
2	15	05	4.09	0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi
2	15	05	4.09	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi
2	15	05	4.10	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian
2	16	03	1.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2	16	03	1.02	0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
2	16	03	1.02	0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
2	16	03	1.02	0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
2	16	03	1.02	0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	16	03	1.02	0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
2	16	03	1.02	0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
2	16	03	1.02	0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
2	16	03	1.02	0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
2	16	03	1.02	0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
2	16	03	1.02	0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
2	16	03	1.02	0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis
2	16	03	1.02	0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
2	16	03	1.02	0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
2	16	03	1.02	0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
2	16	03	1.02	0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
2	17	08	1.01	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
2	18	02	3.03	0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam
2	18	02	3.06	0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi.
2	18	02	4.03	0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam
2	18	02	4.06	0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi.
2	19	02	1.01	0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi
2	19	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
2	19	03	1.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
2	19	04	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	19	04	1.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
2	19	04	1.01	0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi
2	19	04	1.01	0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
2	19	04	1.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
2	20	02	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
2	20	02	1.01	0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
2	20	02	1.01	0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
2	20	02	1.01	0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
2	20	02	1.01	0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
2	21	02	1.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2	22	02	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2	22	02	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
2	22	02	1.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2	22	02	1.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
2	22	02	1.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
2	22	04	1.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
2	22	04	1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
2	22	04	1.01	0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal
2	22	05	1.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya
2	22	05	1.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya
2	22	05	1.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya
2	22	05	1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya
2	22	05	1.02	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
2	22	05	1.03	0001	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
2	22	05	1.03	0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
2	22	05	3.01	0006	Penetapan Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	22	05	3.01	0007	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
2	22	05	3.02	0005	Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi
2	22	05	3.03	0003	Penerbitan izin pemugaran, pengembangan, pengubahan fungsi ruang, pemanfaatan cagar budaya peringkat provinsi
2	22	05	3.04	0001	Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atau Berada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih
2	22	05	4.01	0006	Penetapan itus atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih
2	22	05	4.01	0007	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
2	22	05	4.02	0005	Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi
2	22	05	4.03	0003	Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
2	22	05	4.04	0001	Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atau Berada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih
2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
2	22	06	1.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
2	22	06	1.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
2	22	08	5.01	0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
2	22	08	5.01	0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
2	22	08	5.02	0001	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten
2	22	08	5.03	0001	Pengelolaan Museum Sonobudoyo
2	22	08	5.03	0002	Pengembangan Museum Sonobudoyo
2	22	08	5.04	0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya
2	22	08	5.04	0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
2	22	08	5.06	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
2	22	08	5.06	0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
2	22	08	5.06	0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
2	22	08	5.07	0003	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya
2	22	08	5.08	0001	Pengembangan Lumbung Mataraman
2	22	08	5.08	0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	22	08	5.08	0005	Pengembangan Budaya Bahari
2	22	08	5.08	0006	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram
2	22	08	5.08	0007	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional
2	22	08	5.09	0001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya
2	22	08	5.10	0002	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan
2	23	02	1.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
2	23	02	1.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
2	23	02	1.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2	23	02	1.01	0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit
2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
2	23	02	1.01	0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
2	23	02	1.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	23	03	1.01	0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
2	24	03	1.02	0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	25	02	1.01	0005	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/
3	25	02	1.02	0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir
3	25	02	1.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3	25	03	1.02	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
3	25	03	1.02	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	03	1.03	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil
3	25	03	1.06	0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
3	25	03	1.07	0003	Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)
3	25	03	1.08	0003	Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)
3	25	03	1.09	0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)
3	25	03	1.10	0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)
3	25	03	3.11	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
3	25	03	3.15	0001	Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 GT
3	25	03	4.11	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
3	25	03	4.15	0001	Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 GT
3	25	04	1.01	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3	25	04	1.01	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3	25	04	1.01	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
3	25	04	1.02	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3	25	04	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3	25	04	1.03	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT
3	25	04	1.03	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	04	1.04	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1.04	0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1.05	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
3	25	04	1.05	0010	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1.05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	25	06	1.01	0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1.01	0006	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
3	25	06	1.01	0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar
3	25	06	1.03	0005	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir
3	25	06	3.07	0001	Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar
3	25	06	3.09	0001	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentrapengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan besar

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	06	4.07	0001	Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar
3	25	06	4.09	0001	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentrapengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan besar
3	26	02	1.01	0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
3	26	02	1.01	0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi
3	26	02	1.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.02	0008	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	3.05	0001	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Wilayah Provinsi
3	26	02	4.05	0001	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Wilayah Provinsi
3	26	03	1.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3	26	04	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
3	26	04	1.01	0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik
3	26	04	1.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran
3	26	04	1.02	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
3	26	04	1.02	0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif
3	26	05	1.01	0011	Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	26	05	1.01	0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
3	27	02	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
3	27	02	1.03	0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
3	27	02	1.03	0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
3	27	02	1.03	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
3	27	02	1.04	0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3	27	02	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3	27	02	1.05	0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3	27	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
3	27	03	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
3	27	03	1.01	0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian
3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
3	27	03	1.01	0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
3	27	03	1.01	0012	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet
3	27	03	1.01	0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
3	27	03	1.01	0014	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
3	27	03	1.01	0015	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi
3	27	03	1.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	27	03	1.01	0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
3	27	03	1.01	0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi
3	27	03	1.01	0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
3	27	03	1.01	0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
3	27	03	1.01	0021	Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan
3	27	03	1.01	0022	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Benih atau Balai Benih Ternak Tingkat Provinsi (BIBD Provinsi)
3	27	03	1.01	0023	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
3	27	03	1.01	0024	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan
3	27	03	1.01	0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
3	27	03	1.02	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
3	27	04	1.01	0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan
3	27	06	1.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
3	27	06	1.01	0004	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak
3	27	06	1.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengeccer Obat Hewan
3	27	07	1.01	0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian
3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	28	03	1.03	0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi
3	28	03	1.03	0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani
3	28	03	1.03	0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
3	28	03	1.04	0003	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
3	28	03	1.04	0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
3	28	03	1.04	0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan
3	28	03	1.04	0010	Pembangunan Sumur resapan
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
3	28	03	1.08	0004	Perencanaan pengelolaan KHDTK
3	28	03	1.09	0004	Sertifikasi Mutu Bibit
3	28	03	1.09	0006	Pembangunan Sumber Benih
3	28	04	1.01	0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
3	28	04	1.01	0007	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi
3	28	04	1.01	0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA
3	28	04	1.01	0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi
3	28	04	1.01	0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
3	28	04	1.01	0016	Penataan kawasan Tahura Provinsi
3	28	04	1.03	0001	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst
3	28	04	1.03	0002	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
3	28	04	1.03	0009	Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
3	28	05	3.01	0005	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
3	28	05	4.01	0005	pengembangan Usaha Perhutanan sosial
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
3	28	06	1.01	0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS
3	28	06	1.01	0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
3	29	02	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3	29	02	1.03	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah
3	29	02	1.03	0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
3	29	02	1.03	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
3	29	02	3.06	0001	Penerbitan izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi
3	29	02	3.09	0001	Inventarisasi keragaman geologi (<i>geodiversity</i>), pengusulan penetapan warisan geologi (<i>geoheritage</i>) dan pemanfaatan situs warisan geologi (<i>geoheritage</i>)
3	29	02	3.11	0001	Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana
3	29	02	3.13	0001	Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)
3	29	02	4.06	0001	Penerbitan izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi
3	29	02	4.09	0001	Inventarisasi keragaman geologi (<i>geodiversity</i>), pengusulan penetapan warisan geologi (<i>geoheritage</i>) dan pemanfaatan situs warisan geologi (<i>geoheritage</i>)
3	29	02	4.11	0001	Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana
3	29	02	4.13	0001	Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	03	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
3	29	03	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
3	29	03	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat
3	29	03	1.01	0005	Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut
3	29	03	1.04	0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
3	29	03	1.04	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
3	29	03	1.04	0005	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
3	29	03	1.04	0009	Penetapan Prosedur terhadap pemberian Pertambangan Rakyat
3	29	03	1.04	0010	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat
3	29	03	1.06	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	29	03	1.06	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	29	03	1.13	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	03	1.16	0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Batuan
3	29	03	3.01	0004	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan
3	29	03	3.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat
3	29	03	3.04	0006	Pemberian Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan
3	29	03	3.04	0008	Pembinaan dan Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang pada Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
3	29	03	3.28	0001	Pembinaan dan Pengawasan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3	29	03	4.01	0004	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan
3	29	03	4.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat
3	29	03	4.28	0001	Pembinaan dan Pengawasan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3	29	04	3.02	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi
3	29	04	3.07	0002	Pelaksanaan Pembangunan Industri Pengolahan di Provinsi Papua
3	29	04	3.14	0001	Penetapan dan Pembangunan Posko BBM
3	29	04	4.02	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi
3	29	04	4.07	0002	Pelaksanaan Pembangunan Industri Pengolahan di Provinsi Papua
3	29	04	4.14	0001	Penetapan dan Pembangunan Posko BBM

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	05	1.03	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun
3	29	05	1.03	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun
3	29	05	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun
3	29	05	1.06	0001	Revitalisasi infrastruktur biomassa dan/atau biogas
3	29	05	1.06	0002	Pengoperasian infrastruktur biomassa dan/atau biogas
3	29	05	1.06	0003	Pemeliharaan infrastruktur biomassa dan/atau biogas
3	29	05	1.07	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
3	29	05	1.07	0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT
3	29	05	1.07	0008	Pengoperasian infrastruktur aneka EBT
3	29	05	1.07	0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT
3	29	05	1.09	0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi
3	29	05	1.09	0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi
3	29	05	1.09	0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi
3	29	05	3.05	0002	Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya
3	29	05	3.05	0003	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi
3	29	05	3.05	0004	Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi
3	29	05	3.05	0005	Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi
3	29	05	3.06	0001	Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah
3	29	05	3.06	0002	Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
3	29	05	3.06	0003	Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
3	29	05	3.07	0001	Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah
3	29	05	3.08	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
3	29	05	3.09	0001	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	05	3.09	0003	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
3	29	05	3.09	0004	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
3	29	05	3.09	0005	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
3	29	05	3.09	0006	Bimbingan Teknis Konservasi Energi
3	29	05	3.11	0001	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.
3	29	05	3.12	0001	Pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan barang milik daerah.
3	29	05	3.13	0001	Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)
3	29	05	4.05	0002	Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya
3	29	05	4.05	0003	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi
3	29	05	4.05	0004	Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi
3	29	05	4.05	0005	Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi
3	29	05	4.06	0001	Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah
3	29	05	4.06	0002	Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
3	29	05	4.06	0003	Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
3	29	05	4.07	0001	Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah
3	29	05	4.08	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
3	29	05	4.08	0004	Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah
3	29	05	4.09	0001	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
3	29	05	4.09	0003	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
3	29	05	4.09	0004	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
3	29	05	4.09	0005	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
3	29	05	4.09	0006	Bimbingan Teknis Konservasi Energi
3	29	05	4.11	0001	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	05	4.12	0001	Pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan barang milik daerah.
3	29	05	4.13	0001	Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)
3	29	06	1.01	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.01	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.04	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.04	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.05	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
3	29	06	1.05	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
3	29	06	1.05	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	06	1.06	0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3	29	06	1.06	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3	29	06	1.06	0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3	29	06	1.06	0007	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3	30	02	1.02	0001	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3	30	02	1.02	0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3	30	02	1.03	0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya
3	30	03	1.01	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
3	30	03	1.01	0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
3	30	04	3.01	0003	Fasilitasi bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP
3	30	04	4.01	0004	Fasilitasi bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP
3	31	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
3	31	02	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
3	31	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3	31	02	1.01	0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
3	31	02	3.01	0008	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP
3	31	02	4.01	0008	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP
3	31	04	1.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
3	31	04	1.01	0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	31	04	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
3	32	02	1.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
3	32	02	1.01	0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan
3	32	02	1.01	0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi
3	32	02	1.01	0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
3	32	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	32	03	1.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
3	32	03	1.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
3	32	03	1.01	0008	Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
3	32	04	1.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
3	32	04	1.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
4	01	08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
4	01	09	3.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan
4	01	09	3.03	0001	Pembangunan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
4	01	09	3.03	0002	Pembangunan Laboratorium Pendidikan Tinggi
4	01	09	3.03	0003	Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
4	01	09	3.03	0004	Pembangunan Gedung Serba Guna
4	01	09	3.03	0005	Pembangunan Perpustakaan
4	01	09	3.03	0006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
4	01	09	3.03	0007	Pemeliharaan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
4	01	09	3.03	0008	Pemeliharaan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
4	01	09	3.03	0009	Pemeliharaan Gedung Serba Guna
4	01	09	3.03	0010	Pemeliharaan Perpustakaan
4	01	09	3.03	0011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga
4	01	09	3.03	0012	Rehabilitasi Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
4	01	09	3.03	0013	Rehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi
4	01	09	3.03	0014	Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
4	01	09	3.03	0015	Rehabilitasi Gedung Serba Guna
4	01	09	3.03	0016	Rehabilitasi Perpustakaan
4	01	09	3.03	0017	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga
4	01	09	3.03	0018	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi
4	01	10	5.07	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan
4	01	12	4.02	0001	Pembangunan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
4	01	12	4.02	0002	Pembangunan Laboratorium Pendidikan Tinggi
4	01	12	4.02	0003	Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
4	01	12	4.02	0004	Pembangunan Gedung Serba Guna
4	01	12	4.02	0005	Pembangunan Perpustakaan
4	01	12	4.02	0006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
4	01	12	4.02	0007	Pemeliharaan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
4	01	12	4.02	0008	Pemeliharaan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
4	01	12	4.02	0009	Pemeliharaan Gedung Serba Guna
4	01	12	4.02	0010	Pemeliharaan Perpustakaan
4	01	12	4.02	0011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga
4	01	12	4.02	0012	Rehabilitasi Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi
4	01	12	4.02	0013	Rehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi
4	01	12	4.02	0014	Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
4	01	12	4.02	0015	Rehabilitasi Gedung Serba Guna
4	01	12	4.02	0016	Rehabilitasi Perpustakaan
4	01	12	4.02	0017	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga
4	01	12	4.02	0018	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi
4	02	02	1.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
5	01	02	1.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
5	01	02	1.02	0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
5	01	02	1.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
5	01	02	1.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
5	01	02	1.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)
5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)
5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)
5	01	03	1.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
5	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
5	02	02	1.02	0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
5	02	02	1.04	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
5	02	02	1.06	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
5	02	02	1.06	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	02	03	1.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5	02	04	1.01	0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
5	03	02	1.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
5	05	02	1.01	0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
5	05	02	1.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5	05	02	1.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
5	05	02	1.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
5	05	02	1.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	05	02	1.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
5	05	02	1.03	0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
5	05	02	1.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
5	05	02	1.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
5	05	02	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
5	05	02	1.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
5	05	02	1.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
5	05	02	1.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
5	05	02	1.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	05	02	1.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
5	05	02	1.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	05	02	1.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
5	06	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan
5	06	02	1.02	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
5	06	02	1.02	0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan
5	06	02	1.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
5	06	02	1.03	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
7	01	02	6.01	0001	Perencanaan Rehab Total Rumah Dinas Camat
7	01	02	6.01	0002	Pengadaan Peralatan dan Mebel Rumah Dinas Lurah
7	01	02	6.01	0003	Pengadaan Peralatan dan Mebel Kantor Lurah
7	01	02	6.01	0004	Rehab Berat Kantor Lurah Kota Administrasi
7	01	02	6.01	0005	Rehab Sedang Rumah Dinas Camat Kota Administrasi
7	01	02	6.01	0006	Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi
7	01	02	6.03	0001	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus
7	01	02	6.03	0002	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
7	01	02	6.03	0003	Pemeliharaan KDO Kecamatan
7	01	02	6.03	0004	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas
7	01	02	6.05	0002	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman
7	01	02	6.05	0003	Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan pada Wilayah Kabupaten Administrasi
7	01	02	6.05	0004	Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi
7	02	02	6.01	0001	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
7	02	02	6.02	0001	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus
7	02	02	6.02	0002	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
7	02	02	6.02	0003	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi
7	02	02	6.03	0005	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi
7	02	02	6.03	0013	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi
7	02	02	6.03	0020	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
7	02	02	6.03	0021	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sarana dan Prasarana Kota di Kota Administrasi
7	02	02	6.03	0022	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan
7	03	02	6.01	0008	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kabupaten Administrasi
7	03	02	6.02	0002	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia)
7	03	02	6.03	0002	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota/Kabupaten
7	03	02	6.03	0005	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Sehat di Kabupaten
7	03	02	6.03	0006	Perencanaan Penataan Sarana dan Prasarana PKL
7	03	02	6.03	0007	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Administrasi
7	03	02	6.03	0010	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi
9	01	02	7.04	0011	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan
9	01	02	7.04	0013	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama
9	01	02	7.07	0007	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh
9	01	02	7.07	0008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturahman Aceh
9	01	02	7.07	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh
9	01	03	7.03	0001	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal
9	01	03	7.03	0004	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal
9	01	06	7.03	0004	Pengembangan Sistem Informasi Tamadun Aceh (SITA)